Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 02, Juni 2026

ANALISIS KEUANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KOTA JAMBI

Ulfia[1], Wiwik Tiswiyanti[2], Putri Intan Suri[3]
[1-3]Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
[1]ulfiaamr@gmail.com , [2]wiek-muis@unja.ac.id, [3]putriintansuri@unja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Jambi City Government in increasing Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) during the period 2011–2025. The study is motivated by the relatively low level of regional fiscal independence and the high dependence on transfer funds from the central government, despite the increasing trend of PAD over the years. This research employs a qualitative descriptive method using a regional financial ratio analysis approach. The data used are secondary data obtained from the Budget Realization Reports (APBD) of Jambi City, sourced from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Jambi City. The analysis was conducted using several regional financial performance indicators, including the financial independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, fiscal decentralization ratio, regional financial dependency ratio, harmony ratio, and PAD growth ratio. The results indicate that the financial performance of the Jambi City Government remains in the low to moderate category. The financial independence ratio and fiscal decentralization ratio reveal that PAD contributes relatively little to total regional revenue, resulting in a continued high dependence on central government transfer funds. Meanwhile, the effectiveness and efficiency ratios demonstrate relatively good performance, although fluctuations occurred in several years. In terms of the harmony ratio, the allocation of operational and capital expenditures is considered fairly balanced; however, the proportion of capital expenditure still needs improvement to support regional development more effectively. PAD growth generally showed an increasing trend despite fluctuations caused by regional economic conditions and the impact of the Covid-19 pandemic. Therefore, efforts to optimize local revenue sources, improve financial management efficiency, and strengthen fiscal independence are essential to support sustainable regional development.

Keywords: Regional Financial Performance, Regional Original Revenue, Financial Ratios, Fiscal Independence, Jambi City.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2011–2025. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, meskipun PAD menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis rasio keuangan

daerah. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi. Analisis dilakukan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio keserasian, serta pertumbuhan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi masih berada pada kategori rendah hingga cukup. Rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi. Sementara itu, rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun. Dari aspek keserasian, alokasi belanja operasional dan belanja modal tergolong cukup baik, namun proporsi belanja modal masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan daerah secara optimal. Pertumbuhan PAD selama periode penelitian cenderung meningkat meskipun bersifat fluktuatif, terutama akibat pengaruh kondisi ekonomi dan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi sumber PAD, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, dan penguatan kemandirian fiskal guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Rasio Keuangan, Kemandirian Fiskal, Kota Jambi.

A. Pendahuluan

Kinerja keuangan daerah memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sesuai potensi wilayah masing-masing, sehingga kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama kemandirian fiskal dan keberhasilan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan tidak hanya dilihat dari kesesuaian antara anggaran dan realisasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD.

Penerapan otonomi daerah mendorong perubahan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan sektor publik. PAD yang bersumber dari pajak, retribusi, dan pendapatan sah lainnya mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri. Namun, pada praktiknya sebagian besar daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat karena kontribusi PAD relatif rendah (Halim, 2021).

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah mencakup seluruh hak, kewajiban, serta aset yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam memperkuat otonomi fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan public (Magdalena Y. Devinci et al., 2023). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, kualitas perencanaan, dan pengawasan berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Laetitia et al., 2023; Astuti & Madjid, 2024).

Kinerja keuangan pemerintah daerah umumnya diukur melalui analisis rasio keuangan, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan PAD. Rasio-rasio tersebut digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, meskipun efektivitas dan efisiensi PAD tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan pada setiap wilayah (Rakasiwi, 2024 & Hutauruk, 2024).

Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Dengan jumlah penduduk sekitar 635.101 jiwa pada 2024 serta potensi ekonomi yang beragam, pemerintah Kota Jambi dituntut untuk mengoptimalkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Meskipun PAD Kota Jambi terus mengalami peningkatan, ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa analisis pertumbuhan PAD penting dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian fiskal Kota Jambi (Hapsari et al., 2025).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa deret waktu (time series) periode 2011–2025 yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti laporan keuangan daerah dan publikasi instansi terkait. Data sekunder merupakan data yang

telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk kemudian dimanfaatkan kembali dalam analisis penelitian (Sugiyono, 2018).

Analisis dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, desentralisasi, ketergantungan, keserasian, serta pertumbuhan PAD(Wulandari et al., n.d.). Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menilai peluang peningkatan penerimaan daerah. Rasio-rasio tersebut digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, transparan, dan akuntabel (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi penyelenggara pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan pada wilayahnya. Namun dalam praktiknya, sumbangan PAD terhadap keseluruhan pendapatan serta pengeluaran daerah masih tergolong rendah. Hingga saat ini, komposisi keuangan daerah masih didominasi oleh dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat(Suri et al., 2026).

Data yang digunakan sebagai berikut :

1. Data APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
2. Data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Dan Perkembangan Kinerja Keuangan Kota Jambi Tahun 2011-2025

Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan serta tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah, di mana semakin besar kontribusinya terhadap total pendapatan, semakin rendah ketergantungan pada dana transfer. Kinerja keuangan daerah juga dievaluasi melalui rasio keuangan, seperti kemandirian, efektivitas,

efisiensi, dan keserasian belanja (Abi et al., 2026)

Peningkatan pada perkembangan PAD guna mendanakan pembangunan di wilayahnya diukur dalam satuan persentase.

Tabel 1. Perkembangan PAD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Perkembangan (%)
2011	99.000.000.000,00	-
2012	113.090.000.000,00	14%
2013	149.040.000.000,00	32%
2014	246.430.000.000,00	65%
2015	263.930.000.000,00	7%
2016	287.830.000.000,00	9%
2017	397.330.000.000,00	38%
2018	338.890.000.000,00	-15%
2019	393.430.000.000,00	16%
2020	355.670.000.000,00	-10%
2021	384.730.000.000,00	8%
2022	436.890.000.000,00	14%
2023	415.900.000.000,00	-5%
2024	455.260.000.000,00	9%
2025	605.980.000.000,00	33%
Rata-Rata		15%

Sumber : (data diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 1, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi selama periode 2011–2025 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2013 sebesar 32% dan tahun 2014 sebesar 65%, yang mengindikasikan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, serta kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Sebaliknya, penurunan PAD terjadi pada tahun 2018 sebesar 15%, tahun 2020 sebesar 10%, dan tahun 2023 sebesar 5%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh tidak optimalnya penerimaan pada beberapa sektor pendapatan daerah, normalisasi penerimaan, serta dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, rata-rata perkembangan PAD Kota Jambi selama periode penelitian mencapai 15% dan termasuk kategori baik, yang menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan dari pajak, retribusi, dan sumber PAD lainnya. Namun, fluktuasi yang masih terjadi menunjukkan bahwa PAD belum sepenuhnya stabil karena masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan faktor eksternal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan PAD dan memperluas sumber penerimaan daerah agar pertumbuhan PAD menjadi lebih stabil dan berkelanjutan.

Tabel 2. Perkembangan Kinerja Keuangan

Tahun	Realisasi (Rp)	Perkembangan (%)
2011	869.970.000.000,00	-
2012	1.083.920.000.000,00	25%
2013	1.164.350.000.000,00	7%
2014	1.320.650.000.000,00	13%
2015	1.387.220.000.000,00	5%
2016	1.571.330.000.000,00	13%
2017	1.500.630.000.000,00	-4%
2018	1.624.880.000.000,00	8%
2019	1.699.540.000.000,00	5%
2020	1.621.830.000.000,00	-5%
2021	1.652.950.000.000,00	2%
2022	1.668.660.000.000,00	1%
2023	1.539.450.000.000,00	-8%
2024	1.765.180.000.000,00	15%
2025	1.917.810.000.000,00	9%
Rata-Rata		6%

Sumber : (data diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 2 diatas, Realisasi pendapatan daerah Kota Jambi periode 2011–2025 menunjukkan tren meningkat meskipun berfluktuasi. Pertumbuhan positif mencerminkan kondisi ekonomi yang membaik dan pengelolaan pendapatan yang lebih optimal, sedangkan pertumbuhan negatif dipengaruhi oleh penurunan aktivitas ekonomi, termasuk dampak pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan sebesar 6% menunjukkan kinerja yang cukup stabil, namun masih bergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan PAD untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Total Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD(%)	Kriteria
2011	99.000.000.000,00	603.863.930.000,00	16%	Sangat Rendah
2012	113.090.000.000,00	787.350.000.000,00	14%	Sangat Rendah
2013	149.040.000.000,00	866.270.000.000,00	17%	Sangat Rendah
2014	246.430.000.000,00	917.530.000.000,00	27%	Rendah
2015	263.930.000.000,00	932.520.000.000,00	28%	Rendah
2016	287.830.000.000,00	1.244.770.000.000,00	23%	Sangat Rendah
2017	397.330.000.000,00	1.100.490.000.000,00	36%	Rendah
2018	338.890.000.000,00	1.226.560.000.000,00	28%	Rendah
2019	393.430.000.000,00	1.246.100.000.000,00	32%	Rendah
2020	355.670.000.000,00	1.192.950.000.000,00	30%	Rendah
2021	384.730.000.000,00	1.206.030.000.000,00	32%	Rendah
2022	436.890.000.000,00	1.230.880.000.000,00	35%	Rendah
2023	415.900.000.000,00	1.123.520.000.000,00	37%	Rendah
2024	455.260.000.000,00	1.308.470.000.000,00	35%	Rendah
2025	605.980.000.000,00	1.311.820.000.000,00	46%	Rendah
Rata-Rata			29%	Sangat Rendah

Sumber : (data diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 3, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jambi periode 2011–2025 menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada awal periode, rasio kemandirian berada pada kategori sangat rendah, yaitu 16% pada tahun 2011 dan menurun menjadi 14% pada tahun 2012, yang menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat. Peningkatan mulai terjadi pada tahun 2013 sebesar 17% dan meningkat signifikan pada tahun 2014 menjadi 27%, sehingga masuk kategori rendah. Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan pendapatan transfer.

Pada periode 2018–2021, rasio kemandirian berada pada kisaran 28%–32% dan tetap dalam kategori rendah, termasuk saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Selanjutnya, periode 2022–2025 menunjukkan peningkatan yang lebih baik dengan rasio berkisar 35%–46%, di mana nilai tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 46%.

Secara keseluruhan, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jambi selama periode penelitian sebesar 29% dan termasuk kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif menurut kriteria Abdul Halim. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai memiliki kemampuan membiayai kebutuhan daerah melalui PAD, namun masih cukup bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Rendahnya rasio kemandirian dipengaruhi oleh belum optimalnya penggalian potensi PAD, tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat, serta kondisi ekonomi daerah yang belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi sumber PAD, perluasan basis pajak, serta penguatan pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Kota Jambi.

3. Rasio Efektivitas

Tabel 4. Rasio efektivitas

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD (Rp)	Efektivitas(%)	Kriteria
2011	99.000.000.000,00	78.350.000.000,00	126%	Sangat Efektif
2012	113.090.000.000,00	91.180.000.000,00	124%	Sangat Efektif
2013	149.040.000.000,00	109.340.000.000,00	136%	Sangat Efektif
2014	246.430.000.000,00	175.130.000.000,00	141%	Sangat Efektif
2015	263.930.000.000,00	294.540.000.000,00	90%	Cukup Efektif
2016	287.830.000.000,00	303.490.000.000,00	95%	Cukup Efektif
2017	397.330.000.000,00	320.930.000.000,00	124%	Sangat Efektif
2018	338.890.000.000,00	328.900.000.000,00	103%	Sangat Efektif
2019	393.430.000.000,00	364.140.000.000,00	108%	Sangat Efektif
2020	355.670.000.000,00	403.480.000.000,00	88%	Kurang Efektif
2021	384.730.000.000,00	419.560.000.000,00	92%	Cukup Efektif
2022	436.890.000.000,00	465.890.000.000,00	94%	Cukup Efektif
2023	415.900.000.000,00	515.340.000.000,00	81%	Kurang Efektif
2024	455.260.000.000,00	545.540.000.000,00	83%	Kurang Efektif
2025	605.980.000.000,00	606.280.000.000,00	100%	Efektif
Rata-Rata			106%	Sangat Efektif

Sumber : (data diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 4, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi periode 2011–2025 menunjukkan kondisi fluktuatif, namun secara umum tergolong sangat efektif dengan rata-rata sebesar 106%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD umumnya mampu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Efektivitas tertinggi terjadi pada periode 2011–2014 dan 2017–2019 dengan kategori sangat efektif (>100%), sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2015–2016 (cukup efektif) dan tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 sehingga masuk kategori kurang efektif. Pada periode

2021–2025 efektivitas mulai membaik, meskipun beberapa tahun masih menunjukkan kategori kurang efektif.

Secara keseluruhan, pemerintah Kota Jambi dinilai cukup baik dalam mengelola PAD. Namun, peningkatan akurasi penetapan target dan optimalisasi sumber PAD tetap diperlukan agar efektivitas penerimaan daerah lebih stabil di masa mendatang.

4. Rasio Efisiensi

Tabel 5. Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi PAD (Rp)	Efisiensi(%)	Kriteria
2011	856.740.000.000,00	99.000.000.000,00	865%	Tidak Efisien
2012	1.025.950.000.000,00	113.090.000.000,00	907%	Tidak Efisien
2013	1.151.390.000.000,00	149.040.000.000,00	773%	Tidak Efisien
2014	1.277.950.000.000,00	246.430.000.000,00	519%	Tidak Efisien
2015	1.426.800.000.000,00	263.930.000.000,00	541%	Tidak Efisien
2016	1.526.710.000.000,00	287.830.000.000,00	530%	Tidak Efisien
2017	1.496.300.000.000,00	397.330.000.000,00	377%	Tidak Efisien
2018	1.578.600.000.000,00	338.890.000.000,00	466%	Tidak Efisien
2019	1.661.360.000.000,00	393.430.000.000,00	422%	Tidak Efisien
2020	1.667.720.000.000,00	355.670.000.000,00	469%	Tidak Efisien
2021	1.740.360.000.000,00	384.730.000.000,00	452%	Tidak Efisien
2022	1.622.850.000.000,00	436.890.000.000,00	371%	Tidak Efisien
2023	1.627.520.000.000,00	415.900.000.000,00	391%	Tidak Efisien
2024	1.800.250.000.000,00	455.260.000.000,00	395%	Tidak Efisien
2025	1.807.620.000.000,00	605.980.000.000,00	298%	Tidak Efisien
Rata-Rata			518%	Tidak Efisien

Sumber : (data diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 5, rasio efisiensi keuangan daerah Kota Jambi periode 2011–2025 menunjukkan kondisi fluktuatif, namun seluruhnya berada pada kategori **tidak efisien**, dengan rata-rata rasio sebesar 518%. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rasio yang selalu berada di atas 100%, sehingga mengindikasikan bahwa realisasi belanja daerah masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran daerah.

Rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 907%, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah jauh melampaui PAD. Sebaliknya, rasio terendah terjadi pada tahun 2025 sebesar 298%, yang mencerminkan adanya perbaikan kemampuan keuangan daerah seiring meningkatnya PAD. Meskipun demikian, rasio tersebut masih berada pada kategori tidak efisien karena belanja daerah tetap lebih besar dibandingkan kemampuan PAD.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah Kota Jambi dari aspek efisiensi belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan potensi PAD, memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta

mengendalikan belanja daerah agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

5. Rasio Desentralisasi

Tabel 6. Rasio Desentralisasi

Tahun	Realisasi PAD	Total Pendapatan Daerah (Rp)	RDDF(%)	Kriteria
2011	99.000.000.000,00	869.970.000.000,00	11%	Sangat Rendah
2012	113.090.000.000,00	1.083.920.000.000,00	10%	Sangat Rendah
2013	149.040.000.000,00	1.164.350.000.000,00	13%	Sangat Rendah
2014	246.430.000.000,00	1.320.650.000.000,00	19%	Sangat Rendah
2015	263.930.000.000,00	1.387.220.000.000,00	19%	Sangat Rendah
2016	287.830.000.000,00	1.571.330.000.000,00	18%	Sangat Rendah
2017	397.330.000.000,00	1.500.630.000.000,00	26%	Sangat Rendah
2018	338.890.000.000,00	1.624.880.000.000,00	21%	Sangat Rendah
2019	393.430.000.000,00	1.699.540.000.000,00	23%	Sangat Rendah
2020	355.670.000.000,00	1.621.830.000.000,00	22%	Sangat Rendah
2021	384.730.000.000,00	1.652.950.000.000,00	23%	Sangat Rendah
2022	436.890.000.000,00	1.668.660.000.000,00	26%	Sangat Rendah
2023	415.900.000.000,00	1.539.450.000.000,00	27%	Sangat Rendah
2024	455.260.000.000,00	1.765.180.000.000,00	26%	Sangat Rendah
2025	605.980.000.000,00	1.917.810.000.000,00	32%	Rendah
Rata-Rata			21%	Sangat Rendah

Sumber : (data diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 6 , Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) Kota Jambi periode 2011–2025 menunjukkan kondisi fluktuatif namun cenderung meningkat. Rata-rata RDDF sebesar 21% dan termasuk kategori **sangat rendah**, yang menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil sehingga pemerintah daerah masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2011 dan 2012, RDDF berada pada tingkat terendah yaitu 11% dan 10%, yang menunjukkan rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan melalui PAD. Peningkatan mulai terlihat pada periode 2013–2017, terutama tahun 2017 yang mencapai 26% akibat meningkatnya PAD. Selanjutnya, periode 2018–2024 berada pada kisaran 21%–27%, meskipun masih dalam kategori sangat rendah, termasuk saat pandemi COVID-19 yang memengaruhi penerimaan daerah.

RDDF tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 32% dan masuk kategori rendah, menunjukkan adanya perbaikan kemampuan fiskal daerah melalui peningkatan PAD. Namun, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih belum dominan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Jambi perlu terus mengoptimalkan sumber PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer guna meningkatkan kemampuan desentralisasi fiskal di masa mendatang.

6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 7. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Total Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah (Rp)	RDDF(%)	Kriteria
2011	603.863.930.000,00	869.970.000.000,00	69%	Tinggi
2012	787.350.000.000,00	1.083.920.000.000,00	73%	Sangat Tinggi
2013	866.270.000.000,00	1.164.350.000.000,00	74%	Sangat Tinggi
2014	917.530.000.000,00	1.320.650.000.000,00	69%	Tinggi
2015	932.520.000.000,00	1.387.220.000.000,00	67%	Tinggi
2016	1.244.770.000.000,00	1.571.330.000.000,00	79%	Sangat Tinggi
2017	1.100.490.000.000,00	1.500.630.000.000,00	73%	Sangat Tinggi
2018	1.226.560.000.000,00	1.624.880.000.000,00	75%	Sangat Tinggi
2019	1.246.100.000.000,00	1.699.540.000.000,00	73%	Sangat Tinggi
2020	1.192.950.000.000,00	1.621.830.000.000,00	74%	Sangat Tinggi
2021	1.206.030.000.000,00	1.652.950.000.000,00	73%	Sangat Tinggi
2022	1.230.880.000.000,00	1.668.660.000.000,00	74%	Sangat Tinggi
2023	1.123.520.000.000,00	1.539.450.000.000,00	73%	Sangat Tinggi
2024	1.308.470.000.000,00	1.765.180.000.000,00	74%	Sangat Tinggi
2025	1.311.820.000.000,00	1.917.810.000.000,00	68%	Tinggi
Rata-Rata			73%	Sangat Tinggi

Sumber : (data diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 7, rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Jambi periode 2011–2025 menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi dan relatif stabil, dengan rata-rata sebesar 73% yang termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas.

Rasio ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 69%, sedangkan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 79% akibat meningkatnya pendapatan transfer yang tidak diimbangi pertumbuhan PAD. Pada periode 2017–2024, rasio relatif stabil pada kisaran 73%–75%, yang menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer. Sementara itu, pada tahun 2025 rasio menurun menjadi 68% seiring meningkatnya PAD, meskipun tingkat ketergantungan masih tergolong tinggi.

Secara keseluruhan, tingginya rasio ketergantungan menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kota Jambi belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber PAD melalui peningkatan pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, dan penguatan sektor ekonomi lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

7. Rasio Keserasian

Tabel 8. Rasio Keserasian

Tahun	Total Belanja Operasional	Total Belanja Daerah (Rp)	Keserasian (%)	Kriteria
2011	476.760.000.000,00	856.740.000.000,00	56%	Baik
2012	187.440.000.000,00	1.205.950.000.000,00	16%	Buruk
2013	240.740.000.000,00	1.151.390.000.000,00	21%	Sedang
2014	279.700.000.000,00	1.277.950.000.000,00	22%	Sedang
2015	347.180.000.000,00	1.426.800.000.000,00	24%	Sedang
2016	1.100.130.000.000,00	1.526.710.000.000,00	72%	Baik
2017	1.074.310.000.000,00	1.496.300.000.000,00	72%	Baik
2018	1.130.910.000.000,00	1.578.600.000.000,00	72%	Baik
2019	1.227.370.000.000,00	1.661.360.000.000,00	74%	Baik
2020	1.180.540.000.000,00	1.667.720.000.000,00	71%	Baik
2021	1.238.750.000.000,00	1.740.360.000.000,00	71%	Baik
2022	1.250,300.000.000,00	1.622.850.000.000,00	77%	Baik
2023	1.166.470.000.000,00	1.627.520.000.000,00	72%	Baik
2024	1.392.640.000.000,00	1.800.250.000.000,00	77%	Baik
2025	1.439.840.000.000,00	1.807.620.000.000,00	80%	Baik
Rata-Rata			58%	Baik

Sumber : (data diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 8, rasio keserasian belanja operasional Kota Jambi periode 2011–2025 menunjukkan kondisi fluktuatif namun

cenderung meningkat, dengan rata-rata sebesar 58% dan termasuk kategori **baik**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta pelayanan publik.

Rasio terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 16% (kategori buruk), yang menunjukkan adanya perubahan prioritas anggaran ke sektor lain, seperti belanja modal. Sementara itu, pada periode 2016–2025 rasio meningkat dan relatif stabil pada kisaran 71%–80%, dengan nilai tertinggi pada tahun 2025 sebesar 80%. Kondisi ini menunjukkan tingginya alokasi anggaran untuk kebutuhan operasional pemerintahan, termasuk menjaga pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19.

Secara keseluruhan, komposisi belanja operasional Kota Jambi tergolong baik, namun pemerintah daerah tetap perlu menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal agar anggaran tidak hanya terfokus pada kebutuhan rutin, tetapi juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijalankan melalui pelaksanaan analisis, dapat diambil kesimpulan yakni antara lain :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi yang diukur melalui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan hasil yang masih berada pada kategori rendah hingga cukup, dengan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih belum optimal, sehingga tingkat kemandirian fiskal Kota Jambi belum sepenuhnya tercapai. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi selama periode 2011–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat

meskipun bersifat fluktuatif. Pada beberapa tahun tertentu, terutama pada masa pandemi Covid-19, realisasi PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, pada tahun-tahun terakhir realisasi PAD mulai menunjukkan perbaikan dan semakin mendekati target, yang mengindikasikan adanya peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD telah berjalan, namun masih perlu dioptimalkan agar lebih maksimal dan berkelanjutan.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi yang diukur melalui rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan hasil yang relatif baik, meskipun belum stabil setiap tahunnya. Rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan masih mengalami fluktuasi, di mana pada beberapa periode realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara itu, rasio efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara umum sudah berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat kondisi di mana pengeluaran daerah relatif besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Dari sisi rasio keserasian, pengalokasian belanja operasional dan belanja modal menunjukkan kondisi yang cukup baik, meskipun proporsi belanja modal masih perlu ditingkatkan guna mendukung pembangunan daerah secara lebih optimal. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan PAD masih belum optimal, sehingga diperlukan penguatan strategi pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abi, C. Y., Indiraswari, S. D., & Yogivaria, D. W. (2026). Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan: Peran Moderasi Realisasi Anggaran Jurnal Proaksi, 13(1), 238–258. https://doi.org/10.32534/jpk.v13i1.8529.id

Astuti, H. P., & Madjid, U. (2024). pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di bpkad pemerintah kota tanjungpinang. *JKP) Journal of Government, Social and Politics, 10.*

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Data realisasi dana perimbangan pemerintah daerah. Dalam https://www.djpk.kemenkeu.go

Fajar Rakasiwi. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.* Vol 3 No 1, 1–10.

Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujiatmiko, D. P. S., Umroh, R. U. Z., & Kusumadewi, R. T. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *3*(2), 154–164. https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.175

Halim. (2021). *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik.*

Laetitia, M., Kromen, B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2023). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah).* https://doi.org/10.31933/jimt.v4i4

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik.*

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Keempat). UPP STIM YKPN.*

Mayolanda Hutauruk, M. F. (2024). *Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara.* www.djpk.depkeu.go.id

Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). *desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di indonesia.*

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*

Suri, P. I., Mulawarman, L., Putra, R., Hastuti, D., Hilmana, H., Lesmita, T., & Faisal, M. (2026). *PELATIHAN PENERAPAN STRATEGI TELEMARKETING BERBASIS WHATSAPP BUSINESS PADA MAHASISWA*. *2898*, 30–36.

Wulandari, R., Anggun, B., Lestari, H., & Suryantara, A. B. (n.d.). *ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM*.